

Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).....

**Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam**

Volume 01 , No. 02 (2020 ), hal.115-129

P-ISSN:2715-954X,E-ISSN:2715-9477, 21 Juli 2020

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal>

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, PELAKSANAAN  
ANGGARAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
(Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor)**

Luky Trihandaru Hernanda<sup>1</sup>, Hari Setiyawati<sup>2</sup>

luky.trihandaru@gmail.com<sup>1</sup>, harisetiyawati@gmail.com<sup>2</sup>

*Universitas Mercu Buana Jakarta<sup>1,2</sup>*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Pemerintah Daerah Kota Bogor). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode sensus terhadap 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai responden. Alat yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 24. Data penelitian yang digunakan berasal dari jawaban atas kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. Sensus dilakukan dari tanggal 6 September 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018. Hasil pengkajian dan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan untuk Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi sangat berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**Keyword :** Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran, Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan.

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada para *stakeholder*, antara lain DPRD dan masyarakat umum. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 31 ayat (1), mewajibkan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, fenomena atas buruknya pengelolaan laporan keuangan pada pemerintah daerah, kementerian dan Lembaga negara diungkapkan oleh Wakil ketua BPK RI (Hasan Bisri, 2014) bahwa Kementerian dan Lembaga yang masih menerima opini di bawah WTP bisa saja memperbaiki laporan dan penggunaan anggaran. Hal ini harus didukung dengan adanya komitmen, rencana yang jelas (*action plan*), mekanisme kontrol, dan pejabat yang ditugaskan fokus dalam perbaikan laporan keuangan.

Anggota V BPK RI (Moermahadi Soeja Djanegara, 2015), mengungkapkan BPK RI memberikan opini WDP atas laporan keuangan pemerintah DKI karena terdapat beberapa ketidakberesan dalam penggunaan anggaran. Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Jawa Barat (Cornell S. Prawiradiningrat, 2014), mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor tahun anggaran 2014, masih menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan dan cenderung berulang, baik yang mempengaruhi penyajian maupun tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan.

Ketua BPK RI (Hadi Poernomo, 2011) menyatakan Sebanyak 326 pemda atau 91% dari 358 pemda yang laporan keuangannya diaudit oleh BPK RI mendapatkan predikat buruk, hanya 32 pemda yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Buruknya pengelolaan laporan keuangan pemda, paparnya, sebagian besar terjadi karena sistem pengendalian intern (SPI) yang belum berfungsi secara optimal. Kelemahan SPI terletak pada banyaknya kasus pencatatan keuangan yang tidak atau belum dilakukan, atau dilakukan tetapi tidak akurat. Perencanaan dan penganggaran tidak memadai dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan mekanisme APBD.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran dan implementasi SIA terhadap kualitas pelaporan keuangan.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Komitmen Organisasi**

Kreitner & Kinicki (2014) mengatakan secara pemahaman umum arti kata dari Komitmen adalah sebuah kesetujuan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, orang lain, kelompok atau organisasi. Sedangkan Komitmen Organisasi mencerminkan tingkatan dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya.

Kreitner & Kinicki (2014:165) menyatakan bahwa komitmen organisasi terdiri atas tiga komponen terpisah yang saling berhubungan sebagai berikut:

- a) Komitmen Afektif, merupakan pelekatan emosi pegawai pada, identifikasi pegawai dengan, dan keterlibatan pegawai dalam Perusahaan.
- b) Komitmen Normatif, mencerminkan rasa tanggung jawab untuk terus bekerja.
- c) Komitmen berkelanjutan, merupakan kesadaran akan kerugian karena meninggalkan perusahaan.

### **2.2. Pelaksanaan Anggaran**

Menurut Munandar (2013:1) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam

satuan (Unit Moneter) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disusun berdasarkan rencana kerja yang lengkap disertai dengan rencana keuangannya.

Rencana keuangan yang disusun Pemerintah Daerah ini disebut anggaran daerah atau secara lengkap disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (pasal 1 butir 8) Tentang Keuangan Negara, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Pasal 1 butir 9) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### 2.3. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi

Bodnar & Hopwood (2010) mengatakan Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user dan penggunanya. Sedangkan menurut Considine et.al (2012:12) sebagai berikut:

*“Accounting Information System as the application of technology to the capturing, verifying, storing, sorting and reporting of data relating to an organisation’s activities.”*

Menurut Azhar Susanto (2017), Sistem Informasi Akuntansi adalah:

“Kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/ komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi akuntansi.”

### 2.4. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Dadang Suwanda (2015: 67-68), terdapat tujuan umum atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berikut ini adalah beberapa tujuan umum dari LKPD yaitu:

Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).....

- a) Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan suatu alokasi sumber daya.
- b) Mempunyai peranan prediktif dan prospektif serta menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan serta resiko ketidakpastian yang terkait.
- c) Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) Relevan, apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- b) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- d) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif dimana proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui. Penelitian kuantitatif

lebih menekankan fenomena-fenomena objektif, dan maksimalisasi objektivitas, desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol (Moleong, 2011:2).

Menurut Sugiyono (2007:13) data penelitian pada pendekatan kuantitatif berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif yang digunakan adalah kuantitatif kausal karena bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh. Berdasarkan jenis investigasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal karena penelitian ini ingin menemukan penyebab atau hubungan sebab akibat dari satu atau lebih masalah seperti yang telah dinyatakan dalam rumusan masalah (Sekaran & Bougie, 2010:165).

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bogor yang berjumlah 35 SKPD. Penelitian ini memiliki populasi yang tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis akan mengambil 100% jumlah populasi yang berasal di Pemerintah Daerah Kota Bogor yaitu sebesar 35 orang responden yang bersifat benar-benar mewakili (*representative*) dari setiap SKPD di Pemerintah Kota Bogor.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. Deskripsi Objek Penelitian**

Profil umum responden yaitu pria 18 Responden (51%) sedangkan Perempuan 17 Responden (49%). Para responden memiliki usia mayoritas di atas 35 Tahun yaitu 33 Responden (94%), sedangkan tingkat pendidikan mayoritas lulusan S1, yaitu sebanyak 21 Responden (60%). Berdasarkan masa kerja, responden yang sudah bekerja <5 tahun sebanyak 3 Responden (9%), masa kerja 5 – 10 tahun sebanyak 4 Responden (11%). Masa kerja 11 – 20 tahun memiliki persentase paling besar yaitu 49% atau 17 responden, dan responden yang memiliki masa kerja >20 tahun memiliki persentase 31% atau 11 Responden. Melihat dari profil responden diatas, menunjukkan bahwa para responden sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam memahami baik secara teknis maupun secara organisasi terkait dengan tata cara pengelolaan di masing-masing SKPD.

## 4.2. Analisis Deskriptif

### 4.2.1. Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi

Variabel komitmen organisasi ( $X_1$ ) dalam penelitian ini memiliki 3 dimensi penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Nilai Rata-Rata dan Kategori Dimensi Penelitian**  
**Variabel Komitmen Organisasi**

No	Dimensi	Mean
1	Komitmen Afektif	3,99
2	Komitmen Normatif	4,37
3	Komitmen <i>Continuance</i>	3,60
<b>Nilai Rata-rata (Mean)</b>		<b>3,98</b>

Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa 3 dimensi variabel komitmen organisasi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,98. Hal ini menunjukkan bahwa responden di setiap SKPD Pemerintah Daerah Kota Bogor telah memiliki komitmen organisasi yang baik.

### 4.2.2. Deskripsi Variabel Pelaksanaan Anggaran

Variabel pelaksanaan anggaran ( $X_2$ ) dalam penelitian ini memiliki 6 dimensi penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Nilai Rata-Rata dan Kategori Dimensi Penelitian**  
**Variabel Pelaksanaan Anggaran**

No	Dimensi	Mean
1	Fungsi Otorisasi	4,63
2	Fungsi Perencanaan	4,38
3	Fungsi Pengawasan	4,57
4	Fungsi Alokasi	4,30
5	Fungsi Distribusi	4,31
6	Fungsi Stabilitas	4,49
<b>Nilai Rata-rata (Mean)</b>		<b>4,45</b>

Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel 4.2. dapat dijelaskan bahwa 6 dimensi variabel pelaksanaan anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 4,45. Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah berjalan dengan baik.

#### 4.2.3. Deskripsi Variabel Sistem Informasi Akuntansi

Variabel pelaksanaan implementasi SIA ( $X_3$ ) dalam penelitian ini memiliki 6 dimensi penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Nilai Rata-Rata dan Kategori Dimensi Penelitian**  
**Variabel Implementasi Sistem Informasi Akuntansi**

No	Dimensi	Mean
1	Perangkat Keras ( <i>Hardware</i> )	4,55
2	Perangkat lunak ( <i>Software</i> )	4,48
3	<i>Brainware</i>	4,24
4	Prosedur	4,32
5	<i>Database</i>	4,38
6	Jaringan komputer dan telekomunikasi	4,30
<b>Nilai Rata-rata (Mean)</b>		<b>4,37</b>

Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa dari 6 dimensi variabel implementasi sistem informasi akuntansi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,37. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah berjalan dengan baik.

#### 4.2.4. Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Variabel kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini memiliki 4 dimensi sebagai berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Nilai Rata-Rata dan Kategori Dimensi Penelitian**  
**Variabel Kualitas Laporan Keuangan**

No	Dimensi	Mean
1	Relevan	4,69
2	Andal	4,70
3	Dapat Dibandingkan	4,73
4	Dapat Dipahami	4,63
<b>Nilai Rata-rata (Mean)</b>		<b>4,69</b>

Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa dari 4 dimensi variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,69. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menghasilkan kualitas laporan keuangan yang sangat baik.

#### 4.3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan bahwa variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan analisa data atas jawaban kuesioner, dapat dilihat bahwa mayoritas para responden (kepala SKPD atau Kasubag) memiliki komitmen yang bersifat normatif yang berarti bahwa para responden yaitu ASN cenderung bekerja pada organisasi dengan alasan adanya kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap berada di organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hari Setiawati (2013), namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Lanang Suarmika et.al (2016), Silviana (2012), Liziana Widari et.al (2017), Dadang suwanda (2015), Baja Lodhrakentjana et.al (2014), dan Noprial Valenra Maksyur (2015).

#### 4.4. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terlihat dari IHPS II BPK RI tahun Anggaran 2015 dengan adanya beberapa temuan dari BPK RI terkait dengan lemahnya sistem pengendalian intern yaitu sebanyak 3 permasalahan atas penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja. Sehingga atas beberapa temuan tersebut BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKPD Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2015.

Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).....

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Neco Fransiska et.al (2016), Santha Julia Sardi et.al (2016), Nurdiono et.al (2016), Warsito Kawedar (2009), dan Cecilia Lelly Kewo (2014).

#### 4.5. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan bahwa variabel implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah Kota Bogor telah memiliki sistem informasi akuntansi dalam mengolah data transaksi di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor diantaranya adalah SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dan SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan). Sistem informasi ini di rancang dan dikembangkan dalam rangka upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*E-Government*), serta memudahkan dan mempercepat proses dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya implementasi SIA maka akan meningkatkan dan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramdany (2015), Syafrida Dwi Rachmawati & Fardinal (2017), Ahmad Adel Jamil Abdallah (2013), Nur Zeina Maya Sari et.al (2016), Rukmi Juwita (2013), dan Meiryani (2014).

### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil analisa output pengolahan data maka dapat disimpulkan bahwa Komitmen organisasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Buruknya kualitas laporan keuangan khususnya pada Pemerintah Daerah tidak dipengaruhi oleh komitmen organisasi, walaupun para ASN memiliki komitmen organisasi yang baik namun hal ini tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi yang terbentuk di lingkungan ASN adalah komitmen organisasi yang bersifat normatif yang berarti para ASN cenderung bekerja pada organisasi dengan alasan kewajiban dan tanggung jawab

## Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).....

untuk tetap berada di organisasi. Sedangkan komitmen yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban atas penyajian laporan keuangan masih kurang dalam pemenuhannya. Sedangkan Pelaksanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pelaksanaan anggaran khususnya di sebuah pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan, karena hal ini terkait dengan pengelolaan dana masyarakat yang bertujuan untuk pembangunan sebuah daerah. Jika pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik maka kualitas laporan keuangan juga semakin berkualitas. Sementara Implementasi SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah akan dapat memenuhi kebutuhan dalam penyusunan sebuah laporan keuangan secara efektif dan efisien. Dukungan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan informasi yang baik sehingga kualitas laporan keuangan juga akan semakin berkualitas.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 1). Saat ini para ASN sudah memiliki komitmen yang cukup baik dalam hal komitmen pelaksanaan tugas dan kewajibannya, namun pihak pemerintah daerah perlu membangun sikap komitmen organisasi kepada para ASN yang ditujukan pada pemenuhan kewajiban atas penyajian laporan keuangan. Sehingga jika terdapat temuan dari BPK RI dapat segera menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama untuk perbaikannya. 2). Semua pelaksanaan anggaran di kota Bogor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, hal ini bisa dilihat dari pembangunan yang dilakukan di Kota Bogor sudah sangat bagus, ini menandakan bahwa pelaksanaan anggaran di Kota Bogor benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun pelaksanaan anggaran ini perlu juga diimbangi dengan pengelolaan aset pemerintah yang baik, dengan pengelolaan aset yang baik dapat menjadi proses *monitoring* dan *evaluation* bagi pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. 3). Dalam rangka menjalankan pemerintahan yang berbasis elektronik

Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).....

(*E-Government*), pemerintah daerah Kota Bogor harus lebih banyak memiliki SDM yang lebih kompeten dalam hal penggunaan SIA. Peningkatan kompetensi SDM dapat dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para ASN, hal ini bertujuan agar penggunaan SIA dapat lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

## 6. REFERENSI

- Abdallah, Ahmad Adel Jamil. 2013. *The Impact Of Using Accounting Information Systems On The Quality Of Financial Statements Submitted To The Income And Sales Tax Department In Jordan*. European Scientific Journal, Vol 1, December 2013. ISSN 1857-7431.
- Azhar Susanto. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen*. Universitas Padjajaran, Lingga Jaya, Bandung
- Baja Lodhrakentjana & Elvira Luthan. 2014. *Motivasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Pegawai Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Depok*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Universitas Pancasila, Vol 1, No 2 Hal 187-199, ISSN 2339-1545.
- Bodnar and Hopwood. 2010. *Accounting Information system*. Pearson
- Cecilia Lelly Kewo. 2014. *The Effect of Participative Budgeting, Budget Goal Clarity and Internal Control Implementation on Managerial Performance*. Research Journal of Finance and Accounting, Vol 5, No 12, ISSN 2222-2847, [www.iiste.org](http://www.iiste.org)
- Considine, Brett, Parkes, Alison, Olesen, Karin, Blount Yvette, Speer, Derek. 2012. *Accounting Information Systems: Understanding business processes, 4th Edition*. Australia: John Wiley & Sons australia Ltd.
- Dadang Suwanda. 2015. *Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)*. Research Journal of Finance and Accounting, Vol 6, No 4, ISSN 2222-1697, [www.iiste.org](http://www.iiste.org)
- \_\_\_\_\_. 2015. *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Jakarta: PPM Manajemen

Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).....

Hari Setiyawati. 2013. *The Effect of Internal Accountants' Competence, Managers' Commitment to Organizations and the Implementation of the internal Control System on the Quality of Financial Reporting*. International Journal of Business and Management Invention. Vol 2, ISSN 2319-8028, November 2013, PP 19-27

Indra Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

\_\_\_\_\_. 2009. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. BPFE. Yogyakarta

I Gusti lanang Suarmika dan I Dewa Gede Dharma Suputra. 2016. Kemampuan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas SDM dan Penerapan SIKD pada LKPD Kabupaten Karangasem. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana vol 5.9: 2921-2950.

Jogiyanto. 2008. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kelima. BPFE. Yogyakarta

Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, 2007. Akuntansi Intermediate, Terjemahan Emil Salim Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Penerbit Erlangga

Kreitner, Robert and Kinicki, Angelo (2014), *Organizational Behavior 9th Edition* (Diterjemahkan oleh Salemba Empat – Perilaku Organisasi (2014))

Liziana Widari dan Sutrisno. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen Vol 5, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ISSN 2088-6969, Maret 2017, Hal 117-126

Meiryani. 2014. *Influence of Top Management Support on the Quality of Accounting Information System and Its Impact on the Quality of Accounting Information*. Research Journal of Finance and Accounting, Vol 5, No 11, ISSN 2222-2847, [www.iiste.org](http://www.iiste.org)

Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. 2010. Akuntansi Manajemen. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).....

\_\_\_\_\_. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

Munandar M. 2013. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE.

M. Nafarin. 2013. Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan Kedua, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Neco Fransiska, et.al. 2016. Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Menakar Peran Profesi sebagai Engine of Reform dalam Pembangunan Global Berkelanjutan, Syariah Paper Accounting FEB Universitas Slamet Riyadi. ISSN 2460-0784: 323 – 331.

Noprial Valenra Maksyur. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Vol 2, No 2, ISSN 2355-6854.

Nurdiono et al. 2016. *The Effects Budgets' Proportion And Non-Financial Factors On The Audit Results of Local Governments' Financial Statements in Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JIEB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Vol 31, No 2, Hal 178-191. ISSN 2338-5847.

Nur Zeina Maya Sari et al. 2016. *The Effect of Quality Accounting Information System in Indonesian Government (BUMD at Bandung Area)*. Research Journal of Finance and Accounting, Vol 7 No 2, 2016.ISSN: 2222-2847. [www.iiste.org](http://www.iiste.org)

Ramdany. 2015. *Influence The Quality of Accounting information Systems and The Effectiveness of Internal Control On Financial Reporting Quality*. Research Journal of Finance and Accounting, Vol 6, No 6, 2015 ISSN 2222-2847. [www.iiste.org](http://www.iiste.org)

Rukmi Juwita. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Trikonomika, Vol 12 No 2, Desember 2013, Hal 201-214. ISSN: 1411-514X. Universitas Pasundan, Bandung.

Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).....

Santha Julia Sardi et.al. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satker Balai Besar BMKG Wilayah III Denpasar – Bali). *Infestasi, Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Universitas Trunojoyo, Vol 12, No 2, Hal 158-172, Desember 2016, ISSN 2460-8505.

Sasongko, Catur dan Safrida Rumondang Parulian. 2013. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010. Edisi 5, *Research Method For Business: A Skill Building Approach*. John Wiley @ Sons, New York.

Silviana. 2012. Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis yang Professional*, Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis, ISSN 2252-3936. Bandung

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Syafrida Dwi Rachmawati & Fardinal. 2017. Pengaruh Aktivitas Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *PROFITA*. Volume 10, No. 3. Desember 2017. ISSN 2086-7662. Universitas Mercu Buana. Jakarta.

Warsito Kawedar. 2009. *Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ yang Mengalami Penurunan opini Audit)*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol 6 No 1: Hal 1-8. Universitas Diponegoro.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2004*, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia 2003. *Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia 2004. *Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta

Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).....

Pemerintah Republik Indonesia 2006. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia 2010. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta